

PENILAIAN POLA PENGGUNAAN OBAT MENGGUNAKAN INDIKATOR PERESEPAN WHO DI INDONESIA: STUDI POTONG LINTANG

Hafizh Amrullah^{1*}, Hendik Riawan²

^{1,2}Prodi Sarjana Farmasi STIFI Bhakti Pertiwi

*Corresponding author email: roelly.1983@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan obat tidak rasional menjadi permasalahan serius yang perlu dipecahkan di hampir semua negara. Penelitian penggunaan obat rasional terus dilakukan untuk memperbaiki situasi yang sedang mengalami krisis kesehatan global. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pola persepan di puskesmas kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan kota Mataram.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional menggunakan indikator persepan WHO. Sampel pada penelitian ini adalah Puskesmas yang pelayanan kefarmasiannya dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Penelitian ini menggunakan data retrospektif berdasarkan laporan penggunaan obat rasional (POR) puskesmas.

Sebanyak 24 puskesmas dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan jumlah item per resep di puskesmas Kabupaten OKI sebesar 3,34 sedangkan Kota Mataram 2,38. Persepan obat generik puskesmas Kabupaten OKI dan Kota Mataram sebesar 98,48% dan 94,43%. Persepan antibiotik pada diare non spesifik Kabupaten OKI sebesar 69,05% dan Kota Mataram 0,58%. Persepan antibiotik pada ISPA non-Pneumoni Kabupaten OKI dan Kota Mataram sebesar 54,30% dan 0,52%. Persepan injeksi pada mialgia Kabupaten OKI sebesar 8,27% sedangkan Kota Mataram 0,00%. Pada kesesuaian item dengan Fornas menunjukkan persentase Kabupaten OKI dan Kota Mataram sebesar 89,47% dan 74,98%. Hasil penelitian menyiratkan kewajiban pemantauan dan evaluasi terhadap pola persepan puskesmas secara berkelanjutan agar dampak penggunaan obat yang tidak rasional dapat dihindari.

Kata Kunci: penggunaan obat rasional, pola persepan, indikator persepan, puskesmas.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menggunakan standar pelayanan kefarmasian sebagai acuan dalam melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2016). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan penggunaan obat yang rasional sebagai pasien yang menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individunya, untuk periode waktu yang memadai, dan biaya terendah bagi diri sendiri dan masyarakat (WHO, 1985). Penggunaan obat-obatan yang tidak rasional di fasilitas kesehatan meliputi: penggunaan terlalu banyak obat-obatan

(polifarmasi), penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis, penggunaan injeksi bila pengobatan oral lebih tepat, persepan yang tidak sesuai dengan pedoman klinis, dan swamedikasi pasien (WHO, 2002). Penggunaan obat yang tidak rasional menjadi permasalahan serius yang perlu segera dipecahkan di hampir semua negara (Akl et al., 2014).

Penggunaan obat yang tidak rasional berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian, pemborosan sumber daya, dan meningkatnya biaya *out of pocket* pada pasien serta terjadinya adverse drug reactions. Penggunaan obat yang kurang ataupun berlebih akan menyebabkan meningkatnya resiko resistensi antibiotik dan

resiko penularan hepatitis dan HIV/AIDS akibat penggunaan injeksi yang tidak steril (WHO, 2002).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2014, salah satu tujuannya adalah kendali mutu dan biaya termasuk penggunaan obat, yang relevan terhadap program penggunaan obat yang rasional (Yuniar et al., 2017). Pemantauan penggunaan obat dilakukan untuk memastikan obat digunakan dengan benar (Holloway & van Dijk, 2011). Penelitian terhadap penggunaan obat rasional terus dilakukan untuk memperbaiki situasi yang sedang mengalami krisis kesehatan global.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pola persepsian di puskesmas kabupaten Ogan Komering Ilir dan kota Mataram. Kedua daerah ini berada di luar pulau Jawa yang merupakan pulau dengan populasi tertinggi di Indonesia. Fasilitas kesehatan di luar pulau Jawa rentan terhadap ketersediaan dan keterjangkauan tenaga kesehatan yang rendah dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Hasil penilaian ini dapat mewakili gambaran pola persepsian puskesmas di luar pulau Jawa meskipun tidak dapat digeneralisasikan secara langsung karena prosedur pengambilan sampel tidak mengikuti perhitungan statistik untuk mewakili Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengetahui pola persepsian berdasarkan bukti di puskesmas, masalah penggunaan obat rasional, termasuk polifarmasi, persepsian antibiotik, persepsian injeksi, dan permasalahan lainnya akan jelas digambarkan.

METODE DAN PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan dengan pendekatan cross-sectional untuk mengetahui gambaran pola persepsian puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram. Penelitian ini dilakukan di 2 daerah di luar pulau Jawa yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan mewakili daerah barat Indonesia dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

mewakili daerah timur Indonesia pada bulan Juni-Agustus 2019.

Sasaran dan Subjek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram. Sampel pada penelitian ini adalah Puskesmas yang pelayanan kefarmasiannya dilakukan oleh tenaga kefarmasian (apoteker dan/ tenaga teknis kefarmasian). Puskesmas dipilih berdasarkan purposive sampling yaitu pemilihan dengan kriteria tertentu.

Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data retrospektif berdasarkan laporan penggunaan obat rasional (POR) puskesmas tahun 2018 yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Data dianalisis secara manual menggunakan Microsoft Excel 2010.

Indikator Peresepan

Penelitian ini menilai penggunaan obat yang rasional berdasarkan indikator persepsian WHO. Indikator persepsian beserta nilai standar berdasarkan penelitian sebelumnya (El Mahalli, 2012) terdiri dari rata-rata item per resep yang dihitung dengan membagi total jumlah obat yang diresepkan dengan jumlah kunjungan pasien puskesmas pada tahun 2018 dengan nilai standar ≤ 3 , persentase persepsian obat generik yang dihitung dengan membagi jumlah obat yang diresepkan dengan nama generik dengan total jumlah obat yang diresepkan pada tahun 2018 dikali 100 dengan nilai standar 100%, persentase persepsian antibiotik pada diare non spesifik yang dihitung dengan membagi jumlah antibiotik yang diresepkan pada penyakit diare non spesifik dengan jumlah kunjungan pasien diare non spesifik dikali 100 dengan nilai standar 30%, persentase persepsian antibiotik pada ISPA non Pneumoni yang dihitung dengan membagi jumlah antibiotik yang diresepkan pada penyakit ISPA non Pneumoni dengan jumlah kunjungan pasien ISPA non Pneumoni dikali 100 dengan nilai standar 30%, persentase persepsian injeksi pada mialgia yang dihitung dengan membagi jumlah obat injeksi

yang diresepkan pada penyakit mialgia dengan jumlah kunjungan pasien mialgia dikali 100 dengan nilai standar 10%, dan kesesuaian item obat dengan DOEN/Fornas yang dihitung dengan membagi item obat di puskesmas yang termasuk dalam DOEN/Fornas dengan jumlah item obat yang tersedia di puskesmas dengan nilai standar 100%.

Ethical Approval

Data yang digunakan pada naskah ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelatihan Pelayanan Kefarmasian terhadap Kualitas Pengelolaan Obat dan Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini disetujui oleh Komite Etika Penelitian Medis dan Kesehatan (MHREC) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada – Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta dengan nomor sertifikat Ref: KE/FK/0924/EC/2019, tanggal 08 Agustus 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 24 puskesmas terlibat dalam penelitian ini yang terdiri dari 13 puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 11 puskesmas di Kota Mataram. Gambaran karakteristik puskesmas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1. Mayoritas tenaga kefarmasian yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram adalah tenaga teknis kefarmasian masing-masing sebesar 92,31% dan 54,55%. Pada penelitian ini diikuti oleh lebih banyak puskesmas rawat inap (53,85%) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan di Kota Mataram lebih banyak diikuti puskesmas non rawat inap (63,64%).

Sebagian besar puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja pedesaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (61,54%), dibandingkan dengan di Kota Mataram yang kesemuanya adalah puskesmas perkotaan (100,00%). Puskesmas dengan akreditasi

madya mendominasi puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (76,92%), sedangkan puskesmas di Kota Mataram didominasi oleh puskesmas dengan predikat akreditasi utama (72,73%).

Tabel 1. Distribusi Pengelompokan Puskesmas

No.	Kategori	Puskesmas	
		Kabupaten Ogan Komering Ilir (n=13)	Kota Mataram (n=11)
1	Tenaga Kefarmasian		
	Apoteker	1 (7,69%)	5 (45,45%)
	TTK	12 (92,31%)	6 (54,55%)
2	Kemampuan Penyelenggaraan		
	Rawat Inap	7 (53,85%)	4 (36,36%)
	Non Rawat Inap	6 (46,15%)	7 (63,64%)
3	Karakteristik Wilayah Kerja		
	Perkotaan	2 (15,38%)	11(100,00%)
	Pedesaan	8 (61,54%)	0 (0,00%)
4	Terpencil	3 (23,08%)	0 (0,00%)
	Status Akreditasi		
	Non-Akre	2 (15,39%)	0 (0,00%)
	Dasar	0 (0,00%)	0 (0,00%)
	Madya	10(76,92%)	1 (9,09%)
	Utama	1 (7,69%)	8 (72,73%)
	Pariwisata	0 (0,00%)	2 (18,18%)

Laporan Peresepan Obat Rasional dikumpulkan dari 24 puskesmas selama Januari-Desember 2018 tersaji pada tabel 2-5. Perhitungan indikator peresepan menunjukkan jumlah item per resep antara 2,63 - 4,06 di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 2,00 – 3,20 di puskesmas Kota Mataram. Rata-rata jumlah item per resep di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 3,34 sedangkan puskesmas Kota Mataram 2,38. Persentase peresepan obat generik pada puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram masing-masing sebesar 98,48% dan 94,43%. Persentase peresepan antibiotik pada diare non spesifik sebesar 69,05% di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 0,58% di Kota Mataram. Persentase peresepan antibiotik pada ISPA non Pneumoni di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram masing-masing sebesar 54,30% dan 0,52%.

Tabel 2. Indikator Pereseapan di Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir

Puskesmas	Jumlah Item per Resep	Persentase Obat Generik	Persentase Pereseapan AB pada Diare Non Spesifik
A1	2,88	98,24%	50,79%
A2	2,86	100,00%	43,70%
A3	2,88	100,00%	93,13%
A4	3,09	99,98%	54,84%
A5	3,39	99,04%	53,33%
A6	3,04	96,68%	18,84%
A7	3,54	100,00%	79,49%
A8	3,80	88,85%	59,38%
A9	3,90	100,00%	67,69%
A10	2,63	99,70%	100,00%
A11	4,06	99,99%	84,21%
A12	3,45	100,00%	100,00%
A13	3,86	97,73%	92,31%
\bar{x}	3,34	98,48%	69,05%

Tabel 3. Indikator Pereseapan di Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lanjutan)

Puskesmas	Persentase Pereseapan AB pada ISPA Non Pneumoni	Persentase Pereseapan Injeksi pada Mialgia	Kesesuaian Item dengan Fornas
A1	21,05%	0,00%	89,76%
A2	4,88%	4,49%	86,09%
A3	44,53%	0,00%	90,83%
A4	33,33%	0,00%	89,84%
A5	77,89%	0,00%	87,05%
A6	20,78%	0,00%	90,76%
A7	44,12%	0,00%	87,88%
A8	56,49%	0,00%	90,84%
A9	70,51%	0,00%	91,18%
A10	98,44%	21,05%	90,91%
A11	90,20%	35,42%	92,00%
A12	80,95%	42,50%	89,08%
A13	62,79%	4,00%	86,89%
\bar{x}	54,30%	8,27%	89,47%

Persentase pereseapan injeksi pada mialgia di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 8,27% sedangkan Kota Mataram menunjukkan persentase sebesar 0,00%. Pada kesesuaian item dengan Fornas, hasil perhitungan menunjukkan persentase di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram masing-masing sebesar 89,47% dan 74,98%.

Tabel 4. Indikator Pereseapan di Puskesmas Kota Mataram

Puskesmas	Jumlah Item per Resep	Persentase Obat Generik	Persentase Pereseapan AB pada Diare Non Spesifik
B1	3,20	97,44%	0,00%
B2	2,47	87,59%	0,00%
B3	2,15	77,23%	0,00%
B4	2,18	97,28%	0,00%
B5	2,20	98,57%	0,00%
B6	2,01	97,00%	0,00%
B7	3,00	99,74%	0,00%
B8	2,15	94,56%	0,00%
B9	2,52	90,59%	6,42%
B10	2,00	99,75%	0,00%
B11	2,29	99,00%	0,00%
\bar{x}	2,38	94,43%	0,58%

Tabel 5. Indikator Pereseapan di Puskesmas Kota Mataram (Lanjutan)

Puskesmas	Persentase Pereseapan AB pada ISPA Non Pneumoni	Persentase Pereseapan Injeksi pada Mialgia	Kesesuaian Item dengan Fornas
B1	0,00%	0,00%	73,10%
B2	0,00%	0,00%	73,10%
B3	0,00%	0,00%	76,92%
B4	0,00%	0,00%	74,19%
B5	0,00%	0,00%	76,03%
B6	0,00%	0,00%	75,33%
B7	0,00%	0,00%	77,44%
B8	0,00%	0,00%	75,16%
B9	5,75%	0,00%	72,92%
B10	0,00%	0,00%	75,40%
B11	0,00%	0,00%	75,18%
\bar{x}	0,52%	0,00%	74,98%

Hasil penelitian menunjukkan jumlah item per resep puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 3,34 belum memenuhi standar WHO, sedangkan pada puskesmas di Kota Mataram sudah memenuhi standar WHO sebesar 2,38. Jumlah rata-rata obat yang lebih tinggi mungkin disebabkan oleh insentif finansial untuk lebih banyak pemberi resep, kurangnya pelatihan terapeutik di antara pemberi resep, atau kurangnya obat yang sesuai untuk terapi (Desalegn, 2013). Polifarmasi dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan pemberi resep, tidak tersedianya praktik klinis, insentif finansial

bagi pemberi resep, dan kekurangan obat-obatan esensial. Frekuensi kejadian efek samping dari beberapa obat meningkat, sehingga memberikan beban ekonomi pada pasien.

Perhitungan persentase obat generik pada puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (98,48%) dan Kota Mataram (94,43%) masih di bawah nilai standar 100%. Hal tersebut terjadi karena adanya kekosongan obat generik dan menggantinya dengan obat bermerek dagang. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Chaira dkk (2016a) di mana persepsian obat generik pada 7 puskesmas di kota Pariaman pada tahun 2013 telah sesuai standar (100%). Penggunaan obat generik pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah adalah hal yang wajib dilakukan untuk kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap (Kemenkes RI, 2010).

Persentase persepsian antibiotik pada diare non spesifik dan ISPA non pneumoni menunjukkan puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum memenuhi standar, sedangkan puskesmas di Kota Mataram sudah memenuhi standar WHO. Persentase injeksi pada mialgia menunjukkan bahwa puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram telah memenuhi standar WHO masing-masing sebesar 8,27% dan 0,00%. Pada perhitungan kesesuaian item dengan Fornas, puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram memperlihatkan nilainya masih di bawah standar 100%.

Penggunaan obat yang tidak rasional menjadi permasalahan utama di dunia (WHO, n.d.). Pada penelitian ini, penilaian indikator persepsian digunakan untuk memberikan gambaran pola persepsian yang terjadi di puskesmas dan menjadi informasi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah item per resep di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan puskesmas Kota Mataram masing-masing sebesar 3,34 dan 2,38. Studi lain di 4 provinsi di pulau jawa menunjukkan hal yang sama, di mana 26 puskesmas di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,

dan DIY memiliki rata-rata jumlah item per resep sebesar 3,31 (Yuniar et al., 2017). Penelitian di 10 puskesmas Bahawalpur juga menunjukkan jumlah item per resep yang hampir sama yaitu 3,31 (Atif et al., 2016). Pada penelitian ini, jumlah item per resep di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas di Kota Mataram. Jumlah item per resep yang tinggi bisa disebabkan karena kurangnya pelatihan terapi oleh *prescribers* atau kekurangan obat-obatan sesuai terapi. Sebaliknya, jumlah item per resep yang rendah berarti bahwa ada permasalahan ketersediaan obat atau *prescribers* telah mengikuti pelatihan terapi yang cukup (Desalegn, 2013). Jumlah item per resep dihitung untuk mengetahui tingkat polifarmasi. Pola persepsian polifarmasi akan meningkatkan risiko penggunaan obat yang tidak tepat terutama pasien anak-anak (Jeon et al., 2019). Polifarmasi juga meningkatkan kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan pada pasien geriatri (Ahmed et al., 2014).

Persentase persepsian obat generik di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (98,48%) lebih tinggi daripada puskesmas di Kota Mataram (94,43%), walaupun keduanya masih di bawah standar. Hal tersebut dapat terjadi, meskipun otoritas kesehatan di Indonesia telah mewajibkan penggunaan obat generik pada semua fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. WHO juga merekomendasikan persepsian obat generik karena dapat mengidentifikasi obat dengan jelas, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, dan memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara penyedia layanan kesehatan (WHO, 2017). Penelitian di 4 provinsi di pulau jawa menunjukkan persentase persepsian obat generik sebesar 93,3% (Yuniar et al., 2017). Hal yang sama ditunjukkan pada studi di puskesmas Kota Alexandria menunjukkan persentase persepsian obat generik sebesar 95,4% (Akl et al., 2014). Di sisi lain, rendahnya persentase persepsian obat generik ditunjukkan pada studi di Puskesmas Arab Saudi dan Pakistan masing-masing 61,2% dan 71,6% (Atif et al., 2016; El Mahalli, 2012).

Peresepan antibiotik pada diare non spesifik dan ISPA non pneumoni di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir masing-masing 69,05% dan 54,30% relatif tinggi dibandingkan di Kota Mataram masing-masing 0,58% dan 0,52%. Penelitian yang dilakukan Desalegn (2013) di Ethiopia juga menunjukkan tingginya peresepan antibiotik sebesar 58,1%. Begitu juga dengan studi di Alexandria dan Bahawalpur menunjukkan peresepan antibiotik yang masih di atas standar WHO masing-masing sebesar 39,2% dan 48,9% (Akl et al., 2014; Atif et al., 2016). Peresepan antibiotik yang berlebihan kemungkinan dikarenakan perkiraan yang berlebihan terhadap keparahan penyakit dan keinginan dokter dan/ pasien agar penyakitnya cepat sembuh (Kardela et al., 2014). Dalam studi lain mengungkapkan bahwa tingginya peresepan antibiotik karena kepercayaan budaya tentang antibiotik, harapan pasien yang tinggi akan antibiotik, dan kepercayaan dokter bahwa antibiotik memiliki khasiat terapi yang rendah (Desalegn, 2013). Penggunaan yang berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik merupakan situasi yang mengkhawatirkan terkait kesehatan di masyarakat, terutama di negara berkembang (Atif et al., 2016).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peresepan injeksi pada mialgia sudah memenuhi standar WHO, walaupun beberapa puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan tingginya peresepan injeksi pada mialgia. Peresepan injeksi yang berlebih juga diungkapkan pada studi Atif, dkk (2016) dan Desalegn (2013) masing-masing sebesar 27,1% dan 38,1%. Penggunaan injeksi secara berlebihan dapat meningkatkan kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui darah (WHO Policy Perspectives in Medicines, 2002). Alasan masih tingginya penggunaan injeksi adalah keyakinan dan sikap pasien dan profesional kesehatan tentang kemanjuran injeksi dibandingkan dengan obat oral dan pasien dengan kondisi serius dirawat, diharuskan untuk disuntik untuk menghasilkan aksi onset yang lebih cepat (Desalegn, 2013). Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat peresepan injeksi, yaitu: intervensi pemerintah, di mana pemerintah berperan

besar dalam menekan tingginya tingkat peresepan injeksi melalui penetapan standar terapi, regulasi pengadaan obat dan peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan terutama pengetahuan dokter serta masyarakat di Indonesia (Kardela et al., 2014).

Studi yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram mengungkapkan masih belum optimalnya kesesuaian item obat yang tersedia di puskesmas dengan Fornas/ DOEN masing-masing 89,47% dan 74,98%. Hal yang sama juga ditunjukkan pada studi Yuniar, dkk. (2017) bahwa kesesuaian obat dengan Fornas di puskesmas 4 provinsi di pulau jawa juga masih di bawah standar sebesar 89,00%. Kesesuaian item dengan Fornas/DOEN di bawah nilai standar juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Fithria dan Pratiwi (2014) di Puskesmas Kota Semarang, Chaira, dkk (2016b) di Puskesmas Kota Pariaman, dan Carolien, dkk (2017) di Puskesmas Kabupaten Keerom. Belum sesuainya obat yang tersedia sesuai dengan Fornas/ DOEN mengindikasikan proses seleksi dan perencanaan di puskesmas masih belum berjalan secara optimal (Carolien et al., 2017). Implementasi Fornas/ DOEN di puskesmas sangat penting dilakukan untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasional penggunaan dan pengelolaan obat sekaligus juga meningkatkan daya guna dan hasil guna biaya yang tersedia sebagai salah satu langkah untuk memperluas, pemeratakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Kardela et al., 2014).

Keterbatasan Penelitian

Temuan ini tidak dapat digeneralisasi untuk Indonesia. Namun, berdasarkan fakta sebagian besar daerah luar pulau Jawa di Indonesia yang mengalami keterbatasan tenaga kesehatan, gambarannya hampir sama seperti pada penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak mengungkapkan alasan yang mengarah pada penggunaan obat yang tidak rasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyelidiki faktor-faktor ini.

SIMPULAN

Jumlah item per resep puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir 3,34 dan 2,38 di Kota Mataram, sedangkan standar WHO adalah ≤ 3 item per resep. Persentase peresepan generik di puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram masing-masing 98,48% dan 94,43%, sedangkan standar WHO adalah 100%. Peresepan antibiotik pada diare non spesifik dan ISPA non pneumoni puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir berturut-turut 69,05% dan 54,30%, sementara standar WHO $\leq 30\%$. Di sisi lain, peresepan antibiotik pada diare non spesifik dan ISPA non pneumoni di Kota Mataram sebesar 0,58% dan 0,52%. Peresepan injeksi pada mialgia di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Mataram masing-masing 8,27% dan 0% dengan standar WHO sebesar 10%. Kesesuaian item dengan Fornas/DOEN di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 89,47% dan Kota Mataram adalah 74,98%, sementara standar WHO sebesar 100%.

Hasil penelitian menyiratkan kewajiban pemantauan dan evaluasi terhadap pola peresepan di puskesmas melalui indikator peresepan standar WHO. Dampak penggunaan obat yang tidak rasional, antara lain : polifarmasi dan resistensi antibiotik. Indikator jumlah item per resep dan peresepan antibiotik menjadi perhatian dalam penilaian indikator peresepan ini. Program JKN menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan persentase kesesuaian item dengan Fornas di puskesmas. Intervensi harus diterapkan pada dua sisi, yaitu penyedia pelayanan kesehatan dan pasien/masyarakat. Kesadaran penggunaan obat rasional harus dikenalkan pada seluruh profesional kesehatan terutama dokter dan apoteker mulai dari bangku perguruan tinggi, promosi terus menerus dilakukan sampai kepada pasien dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, B., Nanji, K., Mujeeb, R., & Patel, M. J. (2014). Effects of Polypharmacy on Adverse Drug Reactions among

Geriatric Outpatients at a Tertiary Care Hospital in Karachi: A Prospective Cohort Study. *PLoS ONE*, 9(11), e112133.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0112133>

Akl, O. A., El Mahalli, A. A., Elkahky, A. A., & Salem, A. M. (2014). WHO/INRUD Drug Use Indicators at Primary Healthcare Centers in Alexandria, Egypt. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 9(1), 54–64. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2013.06.002>

Atif, M., Sarwar, M. R., Azeem, M., Naz, M., Amir, S., & Nazir, K. (2016). Assessment of Core Drug Use Indicators Using WHO/INRUD Methodology at Primary Healthcare Centers in Bahawalpur, Pakistan. *BMC Health Services Research*, 16(1), 684. <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1932-2>

Carolien, I., Fudholi, A., & Endarti, D. (2017). Evaluasi Ketersediaan Obat Sebelum Dan Sesudah Implementasi JKN Pada Puskesmas Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.22146/jmpf.30294>

Chaira, S., Zaini, E., & Augia, T. (2016a). Evaluasi Pengelolaan Obat pada Puskesmas di Kota Pariaman. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2016.3.1.97>

Chaira, S., Zaini, E., & Augia, T. (2016b). Evaluasi Pengelolaan Obat pada Puskesmas di Kota Pariaman. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2016.3.1.97>

Desalegn, A. A. (2013). Assessment of Drug Use Pattern Using WHO Prescribing Indicators at Hawassa University Teaching and Referral Hospital, South Ethiopia: A Cross-Sectional Study. *BMC Health Services Research*, 13(1), 170. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-170>

- El Mahalli, A. A. (2012). WHO/INRUD Drug Prescribing Indicators at Primary Health Care Centres in Eastern Province, Saudi Arabia. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 18 (11)(11), 1091–1096. <https://doi.org/10.26719/2012.18.11.1091>
- Fithria, R. F., & Pratiwi, I. D. (2014). Perbedaan Hasil Evaluasi Pengelolaan Obat Puskesmas ISO dan Non ISO Kota Semarang Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik*, 11(2), 18–26.
- Holloway, K., & van Dijk, L. (2011). *The World Medicines Situation 2011*. World Health Organization.
- Jeon, S.-M., Park, S., Rhie, S. J., & Kwon, J.-W. (2019). Prescribing patterns of polypharmacy in Korean pediatric patients. *PLOS ONE*, 14(10), e0222781. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222781>
- Kardela, W., Andrajati, R., & Supardi, S. (2014). Perbandingan Penggunaan Obat Rasional Berdasarkan Indikator WHO di Puskesmas Kecamatan antara Kota Depok dan Jakarta Selatan. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 4(2), 91–102.
- Kemenkes RI. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Kementerian Kesehatan RI.
- WHO. (n.d.). *Rational use of medicines*. WHO. Retrieved April 4, 2020, from http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/
- WHO. (1985). *The Rational Use of Drugs. Report of the Conference of Experts*. World Health Organization.
- WHO. (2017). *Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances*. World Health Organization. https://www.who.int/medicines/services/inn/FINAL_WHO_PHARM_S_NO_M_1570_web.pdf?ua=1
- WHO Policy Perspectives in Medicines. (2002). *Promoting Rational Use of Medicines: Core Components*. World Health Organization.
- Yuniar, Y., Susyanty, A. L., & Sari, I. D. (2017). Assessment of Prescribing Indicators in Public and Private Primary Health Care Facilities in Java, Indonesia. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 7(1), 55–66. <https://doi.org/10.22435/jki.v7i1.5526>